



RENCANA KERJA

BIRO HUKUM

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2018

**PALANGKA RAYA
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan 2016 – 2021, dan rencana kerja tahun 2018 disusun sebagai pedoman pelaksanaan targer dan indikator kinerja pada program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja 2018 ini.

Palangka Raya, Juli 2017

KEPALA BIRO HUKUM



AGUS RESKINOF, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601103 199303 1 003

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN 2017 .	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SOPD.....	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan SOPD	14
1. Visi dan Misi	14
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	15
3. Struktur Organisasi.....	16
4. Susunan Kepegawaian	42
5. Sarana dan Prasarana	43
6. Capaian Kinerja.....	43
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD	47
2.4. Review terhadap rancangan awal SOPD	50
BAB III. TUJUAN DAN SARAN	56
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional	56
3.2. Tujuan dan sasaran renja SOPD.....	57
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	58
BAB V. PENUTUP.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Tahun Anggaran 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021, dimana Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Rencana Kerja (RENJA) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SOPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diwajibkan menyusun Rencana Tahunan (Renja SOPD) untuk menjabarkan Renstra SOPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5

tahun menjabarkan Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No.4286).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara No.4575).
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah No. 34).
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85).
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2016.
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai

pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Biro Hukum sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Biro Hukum dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA tahun 2018 oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SOPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

BAB IV Program Dan Kegiatan

- 4.1. Indikator Kinerja
- 4.2. Kelompok Sasaran
- 4.3. Lokasi Kegiatan
- 4.4. Kebutuhan dana indikatif
- 4.5. Sumber dana

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SOPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 dihitung berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adapun tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD dan Pencapaian Renstra SOPD s/d Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD dan Pencapaian Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017
Provinsi Kalimantan Tengah

SOPD : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja SOPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017	
					Target Renja SOPD 2017	Realisasi Renja SOPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan dana untuk surat menyurat dan pengiriman	800	0	100	0	0,00%	100	0	0,00%
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memenuhi kebutuhan.	16	1	3	3	100,00%	3	4	25,00%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	228	38	38	38	100,00%	38	76	33,33%
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapatkan perbaikan	60	2	10	3	30,00%	10	5	8,33%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja SOPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017	
					Target Renja SOPD 2017	Realisasi Renja SOPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang dilaksanakan	60	0	6	5	83,33%	10	5	8,33%
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang dilaksanakan	60	0	6	5	83,33%	10	5	8,33%
B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
7	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah aparatur yang memiliki kemampuan dalam menyusun produk hukum daerah.	240	0	40	0	0,00%	40	0	0,00%
8	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah.	64	5	8	1	12,50%	10	6	9,38%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja SOPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017	
					Target Renja SOPD 2017	Realisasi Renja SOPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
9	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	30	5	5	3	60,00%	5	8	26,67%
10	Penyusunan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja biro	Jumlah Data Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro.	72	12	12	6	50,00%	12	18	25,00%
D	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
11	Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	60	14	10	3	30,00%	10	17	28,33%
12	Penyusunan Peraturan Gubernur	Jumlah penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.	300	79	50	27	54,00%	50	106	35,33%
13	Penyusunan Keputusan Gubernur	Jumlah penyusunan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.	7600	1252	1150	660	57,39%	1200	1912	25,16%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja SOPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017	
					Target Renja SOPD 2017	Realisasi Renja SOPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
14	Penyusunan Naskah Akademis	Jumlah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan	12	0	2	0	0,00%	2	0	0,00%
15	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengkajian produk hukum daerah.	72	12	12	552	4600,00%	12	564	783,33%
16	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang di evaluasi.	90	14	15	11	73,33%	15	25	27,78%
17	Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan secara refresif.	506	38	75	79	105,33%	81	117	23,12%
18	Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2000	374	320	215	67,19%	327	589	29,45%
19	Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	6	1	1	0	0,00%	1	1	16,67%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja SOPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017	
					Target Renja SOPD 2017	Realisasi Renja SOPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
E	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM									
20	Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	Tersedianya dokumen Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM.	6	1	1	0	0,00%	1	1	16,67%
21	Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Menurut Perspektif HAM	Tersedianya dokumen rancangan produk hukum daerah yang telah di harmonisasikan dengan peraturan HAM.	6	1	1	0	0,00%	1	1	16,67%
22	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	Terwujudnya kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan HAM.	6	1	1	0	0,00%	1	1	16,67%
23	Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan permasyarakatan dan pendidikan HAM	18	1	1	1	100,00%	1	2	11,11%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja SOPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017	
					Target Renja SOPD 2017	Realisasi Renja SOPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
F	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum									
24	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Terselesaikannya pemberian bantuan dan penanganan sengketa hukum kepada unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	60	3	10	13	130,00%	10	16	26,67%
25	Pemberian bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Penanganan atau pendampingan terhadap perkara atau sengketa non litigasi	95	2	15	4	26,67%	15	6	6,32%
G	Program Perencanaan Hukum									
26	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6	1	1	0	0,00%	1	1	16,67%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SOPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja SOPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra SOPD s/d Triwulan II Tahun 2017	
					Target Renja SOPD 2017	Realisasi Renja SOPD 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
H	Program pembinaan sarana dan prasarana hukum									
27	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Tersedianya katalog produk hukum daerah sebagai referensi	1800	0	300	0	0,00%	300	0	0,00%
28	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum	Tersedianya informasi produk hukum daerah yang dapat diakses secara elektronik offline	6500	507	1000	164	16,40%	1000	671	10,32%
29	Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Tersedianya Akses Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah bagi Pemerintahan Daerah, Aparatur dan Masyarakat	72	12	12	9	75,00%	12	21	29,17%
30	Publikasi Produk Hukum Daerah	Penyebarluasan Cetak Lembaran Negara, Lembaran Daerah, Dan	1050	60	150	80	53,33%	200	140	13,33%
31	Menerbitkan Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	Peningkatan jumlah buku himpunan produk hukum daerah	3000	275	500	0	0,00%	500	275	9,17%

2.2. Analisis Kinerja dan Pelayanan Biro Hukum

Analisis Kinerja dan Pelayanan pada Biro Hukum berpedoman pada visi, misi serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Visi dan Misi

Target Kinerja dan Pelayanan pada Biro Hukum berdasarkan visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bidang hukum sebagai berikut :

a. Visi

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pembangunan hukum di Kalimantan Tengah yaitu: "Terwujudnya pembentukan produk hukum daerah, pengelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia, pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan pemberian informasi produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Tengah".

b. Misi

Agar visi tersebut dapat terwujud, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Memberikan telaahan pendampingan dan asistensi kepada pemangku kepentingan dan aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan kualitas aparatur tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah.

- 3) Membuat telaahan dan bantuan hukum pada permasalahan hukum dalam jalur litigasi maupun non litigasi.
- 4) Meningkatkan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia kepada aparatur dan masyarakat.
- 5) Memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat.
- 7) Memberikan informasi tentang produk-produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- b. Pengoordinasian penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Provinsi baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking);

- c. Pelaksanaan pengundangan produk hukum daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta sosialisasi hukum;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada uraian berikut :

a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, koordinasi penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Provinsi baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*), pengkajian produk hukum serta pengundangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- 2) Pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat pengaturan (*regeling*);
- 3) Pelaksanaan penyusunan produk hukum provinsi yang bersifat penetapan (*beschikking*);
- 4) Pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;
- 5) Pelaksanaan penerbitan dan/atau pengundangan produk hukum;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Peraturan Daerah

Sub Bagian Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan atau pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Peraturan Daerah berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- f) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian kegiatan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- g) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian peraturan daerah provinsi.
- h) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi.

- i) Menyiapkan pembahasan rancangan peraturan daerah.
- j) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi / rancangan peraturan daerah.
- k) Menyiapkan pengajuan rancangan Peraturan Daerah Provinsi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.
- l) Menyiapkan bahan permintaan nomor register peraturan daerah, dan penomoran peraturan daerah.
- m) Menyiapkan bahan penetapan/penandatanganan rancangan peraturan daerah.
- n) Menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah (pengundangan peraturan daerah) dan tambahan lembaran daerah.
- o) Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat.
- p) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Peraturan Daerah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan.

2) Sub Bagian Peraturan Gubernur

Sub Bagian Peraturan Gubernur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Gubernur. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Peraturan Gubernur berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b) Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Peraturan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Gubernur baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Gubernur dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Peraturan Gubernur berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.

- f) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian peraturan gubernur.
- g) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan gubernur.
- h) Menyiapkan pembahasan rancangan peraturan gubernur.
- i) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/ rancangan peraturan gubernur.
- j) Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat.
- k) Melaksanakan penomoran peraturan gubernur dan menyiapkan bahan penerbitan berita daerah (pengundangan peraturan gubernur).
- l) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Peraturan Gubernur baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan.

3) Sub Bagian Keputusan Gubernur

Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan

Keputusan Gubernur dan melakukan koordinasi penyusunan rancangan Keputusan Gubernur.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keputusan Gubernur berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keputusan Gubernur berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- f) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian keputusan gubernur.
- g) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan gubernur.

- h) Menyiapkan pembahasan rancangan keputusan gubernur.
- i) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/ rancangan keputusan gubernur.
- j) Melaksanakan penomoran keputusan gubernur.
- k) Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat.
- l) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keputusan Gubernur baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Peraturan Perundang-undangan.

b. Bagian Bantuan Hukum.

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi, pemajuan hak asasi manusia serta melaksanakan tata usaha biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan, penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan, serta dalam rangka memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah
- 2) Pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hubungan kedinasan sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Pengadilan;
- 3) Penanganan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan;
- 4) Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia
- 5) Pelaksanaan harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah yang belum berperspektif hak asasi manusia;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia dan penerapan norma dan standar hak manusia;
- 7) Pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

- 9) Pelaksanaan pembuatan telahaan hukum;
- 10) Pelaksanaan dan pengoordinasian urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- 11) Penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum;
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Litigasi

Sub Bagian Litigasi mempunyai tugas memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur Pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Pengadilan.

Uraian tugas Sub Bagian Litigasi adalah sebagaimana berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Litigasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses

lebih lanjut;

- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Litigasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan;
- g) Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum di pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h) Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur pemerintah Provinsi dalam hubungan kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai akibat adanya gugatan Tata Usaha Negara dan Perdata yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Pengadilan;

- i) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum
- j) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Litigasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

2) Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia

Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menangani penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan dan melakukan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk memfasilitasi peningkatan terhadap penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah.

Uraian Tugas Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) Melakukan koordinasi, konsultasi dan menginventarisir bahan-bahan penyelesaian sengketa hukum;
- g) Menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum di luar Pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menangani penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan;
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelesaian sengketa hukum;
- j) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum dan pertimbangan hukum;
- k) Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan inventarisasi bahan-bahan untuk memfasilitasi peningkatan terhadap

penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;

- l) Menyiapkan bahan perumusan program di bidang pemajuan hak asasi manusia;
- m) Melakukan harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah yang belum berperspektif hak asasi manusia;
- n) Menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia dan penerapan norma standar hak asasi manusia;
- o) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia;
- p) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi perundang-undangan, penyediaan bahan rencana dan program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro.

Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha Biro dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja biro;
- g) Mengelola surat menyurat dan arsip biro;
- h) Mengelola administrasi keuangan biro;

- i) Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro;
- j) Mengelola perlengkapan dan rumah tangga biro;
- k) Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

c. Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum.

Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bidang dokumentasi dan informasi hukum, serta sosialisasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- 2) Penyiapan koordinasi fasilitasi, koordinasi konsultasi, koordinasi evaluasi, dan koordinasi pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota se-kalimantan tengah;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum yakni produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten/kota yang bersifat pengaturan;
- 5) Pelaksanaan inventarisasi dan penggandaan produk hukum;
- 6) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi hukum;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I

Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi, koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Uraian tugas Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I dengan membandingkan

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
- g) Mengoordinasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
- h) Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;

- i) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
- j) Menyiapkan bahan koordinasi konsultasi dan koordinasi pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k) Melakukan kajian dan telaahan dalam proses pembentukan Keputusan Gubernur yang mempunyai dampak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;
- l) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum.

2) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II

Sub Bagian Pengawasan Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi, koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.

Uraian tugas Sub Bagian Pengawasan Wilayah II adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Pengawasan Wilayah II berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi dan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;
- g) Mengoordinasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;
- h) Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;
- i) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;

- j) Menyiapkan bahan koordinasi konsultasi dan koordinasi pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k) Melakukan kajian dan telaahan dalam proses pembentukan Keputusan Gubernur yang mempunyai dampak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau
- l) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengawasan Wilayah II baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengawasan dan Dokumentasi Hukum.

3) Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum.

Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dokumentasi produk-produk hukum, dan pelayanan perpustakaan hukum

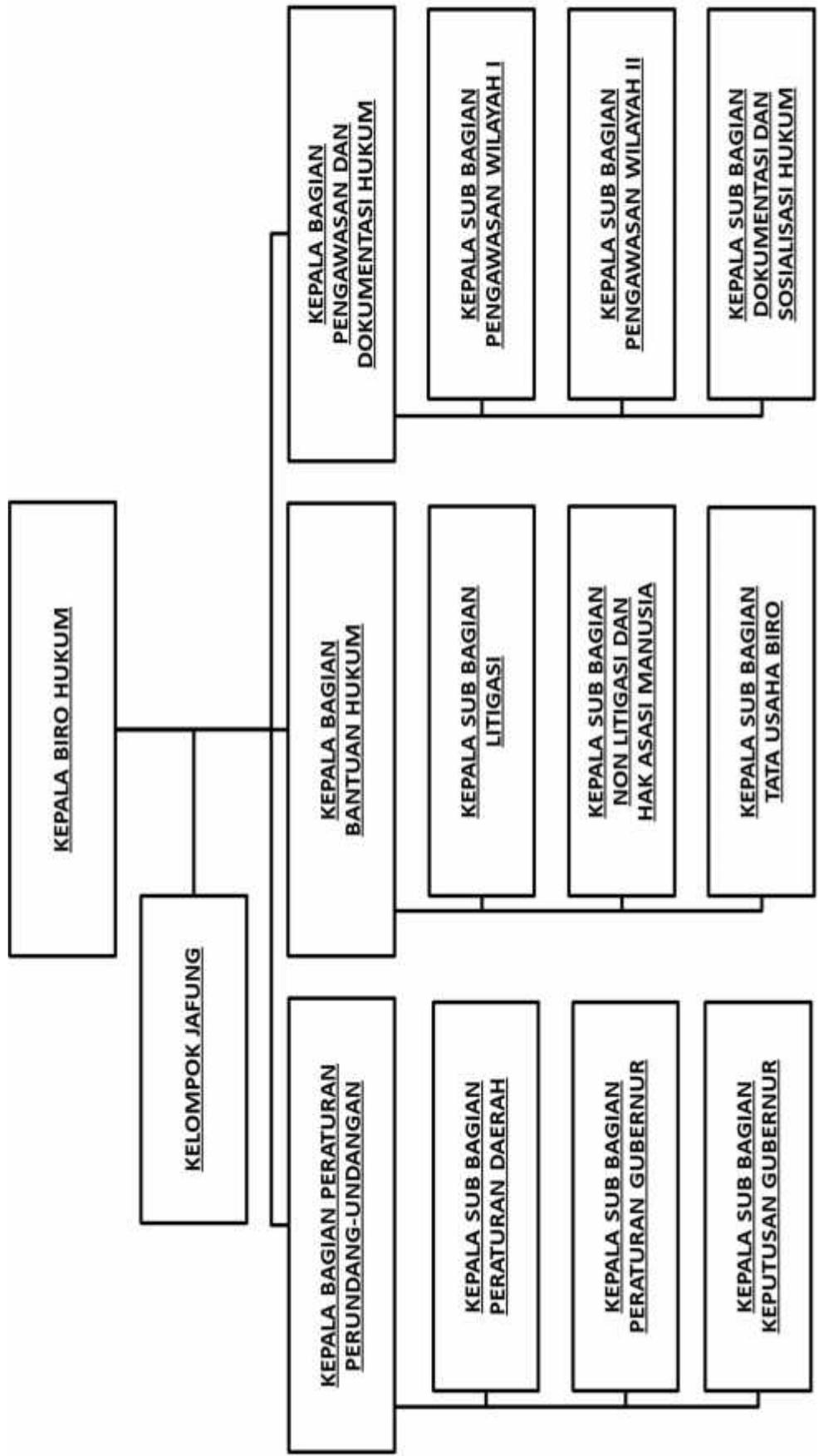
serta bahan publikasi serta sosialisasi produk-produk hukum.

Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f) Mengumpulkan dan mengelola bahan dokumentasi produk-produk hukum;

- g) Mengelola dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;
- h) Memelihara, menata dan menyelenggarakan layanan perpustakaan hukum;
- i) Menyiapkan bahan sosialisasi hukum;
- j) Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- k) Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan sosialisasi hukum;
- l) Menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan;
- m) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hak Asasi Manusia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Bantuan Hukum.

**GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



4. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

a. Jumlah menurut Struktur Biro Hukum

) Kepala Biro	1 Orang
) Kepala Bagian	3 Orang
) Kepala Sub Bagian	9 Orang
) Staf PNS	36 Orang
) Tenaga Kontrak	16 Orang

b. Jumlah menurut Pendidikan Formal

) S3	1 Orang
) S2	8 Orang
) S1	30 Orang
) D3	4 Orang
) SLTA	7 Orang

3. Kepangkatan/ Gol. Ruang

) Golongan IV	4 Orang
) Golongan III	29 Orang
) Golongan II	3 Orang
) Golongan I	- Orang

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Operasional Kantor yang telah ada saat ini sudah cukup baik dan telah terfasilitasi dengan baik, terdiri dari:

) Komputer	45 Unit
) Mesin Ketik	5 Unit
) Meja kerja	41 Buah
) Kursi kerja	58 Buah
) Lemari arsip	52 Buah
) Sofa/Kursi tamu	1 Set
) AC Split	8 Unit
) Mesin Fotocopy	1 unit

6. Capaian Kinerja

Pelaksanaan program kegiatan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara detail dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Hukum

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Biro						Realisasi Capaian						Proyeksi 2017	Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat/ Paket yang dikirim	Jumlah Surat/ Paket yang dikirim	Paket Pengelolaan Surat Menyurat	300	100	100	100	100	100	0%	0,00%	0%	0%	0%	0%	100%	
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia	Paket Pengadaan	1	3	3	3	3	3	100%	25,00%	0%	0%	0%	0%	100%	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyedia Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan	38	38	38	38	38	38	100%	33,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pengelolaan administrasi Keuangan	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang diperbaiki	10	10	10	10	10	10	20%	8,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang dilaksanakan	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	0	6	10	10	10	10	0%	8,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang dilaksanakan	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	0	6	10	12	14	18	0%	8,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
7	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah.	Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	40	40	40	40	40	40	0%	0,00%	0%	0%	0%	0%	100%	
8	Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan teknis sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis	Jumlah Aparatur yang mempunyai kemampuan mengelola sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	30	30	30	30	30	30	0%	0,00%	0%	0%	0%	0%	100%	
9	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	6	8	10	12	14	14	83%	9,38%	0%	0%	0%	0%	100%	
10	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	5	5	5	5	100%	26,67%	0%	0%	0%	0%	100%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Biro						Realisasi Capaian						Proyeksi 2017	Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	Terwujudnya laporan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja biro	Jumlah Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja	Jumlah laporan rencana kerja dan evaluasi rencana kerja biro	12	12	12	12	12	12	100%	25,00%	0%	0%	0%	0%	100%	
12	Penyusunan Peraturan Daerah	Meningkatnya kualitas peraturan daerah.	Jumlah Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah	10	10	10	10	10	10	140%	28,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
13	Penyusunan Peraturan Gubernur	Meningkatnya kualitas peraturan gubernur.	Jumlah Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Gubernur	50	50	50	50	50	50	158%	35,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
14	Penyusunan Keputusan Gubernur	Meningkatnya kualitas keputusan gubernur.	Jumlah Keputusan Gubernur	Jumlah Keputusan Gubernur	1000	1150	1200	1350	1400	1400	125%	25,16%	0%	0%	0%	0%	100%	
15	Penyusunan Naskah Akademis	Tersusunnya Naskah Akademik Ranperda.	Jumlah Naskah Akademis	Jumlah Naskah Akademis	2	2	2	2	2	2	0%	0,00%	0%	0%	0%	0%	100%	
16	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya produk hukum daerah implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	Jumlah Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	12	12	12	12	12	12	100%	783,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
17	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terwujudnya rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang di evaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kebutuhan masyarakat	Jumlah Evaluasi dan pemantauan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi dan pemantauan Produk Hukum Kabupaten/Kota	15	15	15	15	15	15	93%	27,78%	0%	0%	0%	0%	100%	
18	Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengawasan refresif produk hukum daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan secara proporsional dan perlindungan hak-hak masyarakat	Jumlah Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah Pengawasan Produk Hukum Daerah	70	75	81	87	93	93	14%	23,12%	0%	0%	0%	0%	100%	
19	Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terwujudnya rancangan produk hukum daerah kabupaten / kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penataan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	315	320	327	335	343	343	117%	29,45%	0%	0%	0%	0%	100%	
20	Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terwujudnya rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan perancangan	Jumlah rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan perancangan	Jumlah rancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan perancangan	1	1	1	1	1	1	100%	16,67%	0%	0%	0%	0%	100%	
21	Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	Terlaksananya Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	Jumlah Kegiatan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1	1	1	1	1	1	100%	16,67%	0%	0%	0%	0%	100%	
22	Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Menurut Perspektif HAM	Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan HAM	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	1	1	1	1	1	1	100%	16,67%	0%	0%	0%	0%	100%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Biro						Realisasi Capaian						Proyeksi 2017	Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	Terlaksananya Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	Jumlah Dokumen Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	Jumlah Dokumen Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	1	1	1	1	1	1	100%	16,67%	0%	0%	0%	0%	100%	
24	Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM	Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan, diseminasi dan pendidikan HAM	Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM	Jumlah Kegiatan Pendidikan HAM	1	1	1	1	1	1	100%	11,11%	0%	0%	0%	0%	100%	
25	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	10	10	10	10	10	10	120%	26,67%	0%	0%	0%	0%	100%	
26	Pemberian bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Provinsi	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	20	15	15	15	15	15	10%	6,32%	0%	0%	0%	0%	100%	
27	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terwujudnya Program Pembentukan Perda yang berkualitas.	Jumlah Dokumen Program Legislasi Daerah	Jumlah Dokumen Program Legislasi Daerah	1	1	1	1	1	1	100%	16,67%	0%	0%	0%	0%	100%	
28	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Terwujudnya Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah	Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah	300	300	300	300	300	300	0%	0,00%	0%	0%	0%	0%	100%	
29	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Jumlah Data Produk Hukum Daerah	Jumlah Data Produk Hukum Daerah	1500	1000	1000	1000	1000	1000	34%	10,32%	0%	0%	0%	0%	100%	
30	Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pengelolaan website	Jumlah kegiatan pengelolaan website	12	12	12	12	12	12	100%	29,17%	0%	0%	0%	0%	100%	
31	Publikasi Produk Hukum Daerah	Terwujudnya Program Pembentukan Perda yang berkualitas.	Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah	100	150	200	200	200	200	60%	13,33%	0%	0%	0%	0%	100%	
32	Menerbitkan Buku Himpunan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya jumlah buku himpunan produk hukum daerah	Jumlah buku himpunan produk hukum daerah	Jumlah buku himpunan produk hukum daerah	500	500	500	500	500	500	55%	9,17%	0%	0%	0%	0%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Hukum.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan kembali dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru serta kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempengaruhi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018. Peraturan-peraturan terbaru yang harus disesuaikan dengan kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan sejak tanggal 2 Oktober 2014 dalam jangka waktu 2 tahun telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini berakibat tidak konsistennya penerapan dan implementasi di daerah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini sebagai payung hukum yang sifatnya umum dan luas, dirasa masih kurang memiliki peraturan pelaksana yang sifatnya operasional, sehingga menyulitkan dalam menyusun peraturan pelaksana di tingkat daerah.

Akan tetapi, meskipun terdapat kendala tersebut di atas, sangat disadari bahwa Biro Hukum dalam kapasitasnya sebagai salah satu institusi penyelenggaraan pemerintah daerah perlu lebih memahami spirit dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut agar dapat menuangkan

dan menerapkannya dalam rangka meningkatkan keutamaan pelayanan publik bagi masyarakat.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Konsekuensi terbesar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu adanya pergeseran dalam hal pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut diimplementasikan Pemerintah Pusat melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai bentuk-bentuk perangkat daerah beserta besaran organisasi dan urusan yang ditangani, dengan berpedoman pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diikuti perintah agar masing-masing Pemerintah Daerah segera melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebelum berakhirnya Tahun 2016. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing perangkat daerah.

Dengan adanya perombakan organisasi perangkat daerah tersebut, ditahun 2018 ini, maka Biro Hukum akan banyak berkonsentrasi dalam hal penyusunan produk hukum provinsi, pengawasan produk hukum kabupaten/kota se-Kalimantan

Tengah, serta perlu banyak melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi hukum terkait produk-produk hukum yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengganti serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengatur mengenai bentuk-bentuk produk hukum beserta teknis dan tata cara pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan adanya peraturan terbaru ini maka dalam pelaksanaan rencana kerja, beban kerja berdasarkan salah satu tugas pokok dan fungsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pengoordinasian penyusunan dan perumusan produk hukum daerah harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					5.746.500.000					5.746.500.000	
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				901.500.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				901.500.000	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Surat/ Paket yang dikirim	300	1.500.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Surat/ Paket yang dikirim	300	1.500.000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia	1	40.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia	1	40.000.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	38	530.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	38	530.000.000	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	10	30.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	10	30.000.000	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang laksanakan	15	200.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Daerah yang laksanakan	15	200.000.000	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang laksanakan	12	100.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah yang laksanakan	12	100.000.000	
B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				470.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				470.000.000	
7	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis	40	110.000.000	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis	40	110.000.000	
8	Sosialisasi produk hukum daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah	10	360.000.000	Sosialisasi produk hukum daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum Daerah	10	360.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				264.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				264.000.000	
9	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	90.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	90.000.000	
10	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja	12	174.000.000	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja	12	174.000.000	
D	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.149.000.000	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				2.149.000.000	
11	Penyusunan Peraturan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peraturan Daerah	10	378.000.000	Penyusunan Peraturan Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peraturan Daerah	10	378.000.000	
12	Penyusunan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peraturan Gubernur	50	241.000.000	Penyusunan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peraturan Gubernur	50	241.000.000	
13	Penyusunan Keputusan Gubernur	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Keputusan Gubernur	1000	210.000.000	Penyusunan Keputusan Gubernur	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Keputusan Gubernur	1000	210.000.000	
14	Penyusunan Naskah Akademis	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyusunan Naskah Akademis	1	120.000.000	Penyusunan Naskah Akademis	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penyusunan Naskah Akademis	1	120.000.000	
15	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pengkajian Produk Hukum Daerah	12	330.000.000	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pengkajian Produk Hukum Daerah	12	330.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi	15	288.000.000	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi	15	288.000.000	
17	Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif	70	144.000.000	Pengawasan Refresif Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara refresif	70	144.000.000	
18	Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	315	324.000.000	Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang tertata format dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	315	324.000.000	
19	Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan instrumen pemerintahan kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan perancangan	1	114.000.000	Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rancangan instrumen pemerintahan kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan perancangan	1	114.000.000	
E	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM				440.400.000	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM				440.400.000	
20	Pengembangan Kerjasama Kesadaran Hukum dan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama bidang hukum dan HAM	1	114.000.000	Pengembangan Kerjasama Kesadaran Hukum dan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya dokumen pengembangan kerjasama bidang hukum dan HAM	1	114.000.000	
21	Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	1	98.400.000	Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	1	98.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan HAM	1	114.000.000	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan HAM	1	114.000.000	
23	Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan permasyarakatan dan pendidikan HAM	1	114.000.000	Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan permasyarakatan dan pendidikan HAM	1	114.000.000	
F	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum				810.000.000	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum				810.000.000	
24	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	10	624.000.000	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	10	624.000.000	
25	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	20	186.000.000	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	20	186.000.000	
G	Program Perencanaan Hukum				180.000.000	Program Perencanaan Hukum				180.000.000	
26	Penyusunan Program Pembentukan Perda	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Perda	1	180.000.000	Penyusunan Program Pembentukan Perda	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Perda	1	180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
H	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penerbitan buku saku produk hukum daerah		531.600.000	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penerbitan buku saku produk hukum daerah		531.600.000	
27	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah	300	48.000.000	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Katalog Produk Hukum Daerah	300	48.000.000	
28	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Data Produk Hukum Daerah	1500	123.600.000	Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Data Produk Hukum Daerah	1500	123.600.000	
29	Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pengelolaan website	12	240.000.000	Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pengelolaan website	12	240.000.000	
30	Publikasi Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah	100	60.000.000	Publikasi Produk Hukum Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Cetak Publikasi Produk Hukum Daerah	100	60.000.000	
31	Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah buku himpunan produk hukum daerah	500	60.000.000	Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah buku himpunan produk hukum daerah	500	60.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan UUD 1945, arah dan kebijakan pembangunan nasional, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025, maka pelaksanaan tugas yang ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan arah kebijakan Prolegnas tahun 2015 – 2019 yaitu :

1. Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa.
3. Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Melalui arah kebijakan Prolegnas 2015 – 2019 tersebut juga pemerintah pusat membuat arah kebijakan bidang hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yaitu:

1. Melaksanakan penegakan hukum dan masyarakat.
2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat.
3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut maka program dan kegiatan dan terlaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah wajib bersinergi dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum.
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.
3. Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat.
4. Menjadi alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kerja.

3.2.2 Sasaran

1. Terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan.
2. Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang hukum.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2018 berdasarkan jumlah belanja pegawai, jumlah belanja barang dan jasa, serta belanja modal dipersiapkan dalam rangka memenuhi target kinerja dengan rincian Pelaksanaan Rencana Kerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Nilai Belanja pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018

Pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018, total Anggaran berdasarkan estimasi perencanaan adalah sebesar Rp. 5.746.500.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan untuk mengakomodir fasilitas sarana dan prasarana, dokumentasi hukum, peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, bantuan hukum, serta koordinasi pemenuhan hak asasi manusia. Adapun program dan kegiatan yang ada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SOPD

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Sosialisasi Produk Hukum Daerah

b. Bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah

c. Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah

4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a. Penyusunan Peraturan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Gubernur

c. Penyusunan Keputusan Gubernur

d. Penyusunan Naskah Akademis

e. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

f. Penataan Produk Hukum Kabupaten/Kota

g. Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Kabupaten/Kota

h. Pendampingan Perancangan Instrumen Pemerintahan Kabupaten/Kota

5. Peningkatan Kesadaran Hukum Dan HAM

a. Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum dan HAM

b. Harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan HAM

c. Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan HAM

d. Pemasyarakatan HAM, Diseminisasi Dan Pendidikan HAM

6. Peningkatan Pelayanan Dan Bantuan Hukum

- a. Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi
- b. Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi

7. Program Perencanaan Hukum

- a. Program Pembentukan Peraturan Daerah

8. Program Pembinaan Sarana Dan Prasarana Hukum

- a. Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah
- b. Peningkatan Pengelolaan aplikasi database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah
- c. Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah
- d. Publikasi Produk Hukum Daerah
- e. Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan seperti yang tercantum dalam tabel 4.1

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2018
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Prakiraan Maju (2019) (Rp)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG										5.746.500.000	6.895.800.000		
4.06	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN													
4.06 - 4.6.0302 - 1	PROGRAM ADMINISTRASI PELAYANAN ADMINISTRASI										901.500.000	1.081.800.000		
4.06 - 4.6.0302 - 1.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Pengiriman Surat/ Paket	300 surat/paket	Jumlah Pengiriman Surat/ Paket	300 surat/paket	Jumlah Pengiriman Surat/ Paket	300 surat/paket	1.500.000	1.800.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	1 pengadaan barang/jasa	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	1 pengadaan barang/jasa	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	1 pengadaan barang/jasa	40.000.000	48.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	38 Orang	Tersedianya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	38 Orang	Tersedianya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	38 Orang	530.000.000	636.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 1.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Kualitas Peralatan Kerja	10 Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Kualitas Peralatan Kerja	10 Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Kualitas Peralatan Kerja	10 Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000	36.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	15 Rapat Koordinasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	15 Rapat Koordinasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	15 Rapat Koordinasi	200.000.000	240.000.000	BIRO HUKUM	kegiatan baru
4.06 - 4.6.0302 - 1.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah	12 Rapat Koordinasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah	12 Rapat Koordinasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam daerah	12 Rapat Koordinasi	100.000.000	120.000.000	BIRO HUKUM	kegiatan baru

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017 (Rp)	Prakiraan Maju (2018) (Rp)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06 - 4.6.0302 - 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										470.000.000	564.000.000		
4.06 - 4.6.0302 - 5.113	Bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur yang memahami cara penyusunan produk hukum daerah	40 aparatur	Jumlah Aparatur yang memahami cara penyusunan produk hukum daerah	40 aparatur	Jumlah Aparatur yang memahami cara penyusunan produk hukum daerah	40 aparatur	110.000.000	132.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 5.125	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Aparatur yang memahami produk hukum daerah	10 Sosialisasi	Jumlah Aparatur yang memahami produk hukum daerah	10 Sosialisasi	Jumlah Aparatur yang memahami produk hukum daerah	10 Sosialisasi	360.000.000	432.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										264.000.000	316.800.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun 2016 yang telah disusun	5 Dokumen Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun 2016 yang telah disusun	5 Dokumen Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun 2016 yang telah disusun	5 Dokumen Laporan	90.000.000	108.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 6.57	Penyusunan Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro yang telah disusun	12 Dokumen Laporan	Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro yang telah disusun	12 Dokumen Laporan	Rencana Kerja dan Evaluasi Rencana Kerja Biro yang telah disusun	12 Dokumen Laporan	174.000.000	208.800.000	BIRO HUKUM	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017 (Rp)	Prakiraan Maju (2018) (Rp)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06 - 4.6.0302 - 19	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM										440.400.000	528.480.000		
4.06 - 4.6.0302 - 19.2	Pengembangan Kerjasama Bidang Hukum Dan HAM	Tata Kerja Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Jumlah Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Jumlah Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Jumlah Kerjasama Bidang Hukum dan HAM	1 laporan hasil	114.000.000	136.800.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 19.4	Harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan HAM	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Jumlah Produk Hukum Daerah yang diharmonisasikan dengan HAM	1 laporan hasil	98.400.000	118.080.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 19.5	Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan HAM	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan HAM	1 laporan hasil	114.000.000	136.800.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 19.6	Pemasyarakatan dan Pendidikan HAM	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Palangka Raya	Peningkatan Pendidikan Hukum dan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Pendidikan Hukum dan HAM	1 laporan hasil	Peningkatan Pendidikan Hukum dan HAM	1 laporan hasil	114.000.000	136.800.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM										810.000.000	972.000.000		
4.06 - 4.6.0302 - 20.2	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Litigasi	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Litigasi	10 Perkara Litigasi	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Litigasi	10 Perkara Litigasi	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Litigasi	10 Perkara Litigasi	624.000.000	748.800.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 20.3	Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Non Litigasi	20 Kasus Non Litigasi	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Non Litigasi	20 Kasus Non Litigasi	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Non Litigasi	20 Kasus Non Litigasi	186.000.000	223.200.000	BIRO HUKUM	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2017 (Rp)	Prakiraan Maju (2018) (Rp)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.06 - 4.6.0302 - 21	PROGRAM PERENCANAAN HUKUM										180.000.000	216.000.000		
4.06 - 4.6.0302 - 21.4	Penyusunan Program Pembentukan Perda	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya 1 dokumen Program Pembentukan Perda	1 Dokumen Program Legislasi Daerah	Tersedianya 1 dokumen Program Pembentukan Perda	1 Dokumen Program Legislasi Daerah	Tersedianya 1 dokumen Program Pembentukan Perda	1 Dokumen Program Legislasi Daerah	180.000.000	216.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 22	PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM										531.600.000	637.920.000		
4.06 - 4.6.0302 - 22.5	Peningkatan Penataan Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Jumlah Sarana Hukum Melalui Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	300 Katalog	Peningkatan Jumlah Sarana Hukum Melalui Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	300 Katalog	Peningkatan Jumlah Sarana Hukum Melalui Sistem Katalog Produk Hukum Daerah	300 Katalog	48.000.000	57.600.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 22.6	Peningkatan Pengelolaan aplikasi database Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Jumlah Data Melalui Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	1500 File produk hukum	Peningkatan Jumlah Data Melalui Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	1500 File produk hukum	Peningkatan Jumlah Data Melalui Sistem Informasi Hukum Kalimantan Tengah	1500 File produk hukum	123.600.000	148.320.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 22.7	Peningkatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalimantan Tengah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Pengelolaan Sarana Melalui Website JDIIH Kalteng	12 Bulan	Peningkatan Pengelolaan Sarana Melalui Website JDIIH Kalteng	12 Bulan	Peningkatan Pengelolaan Sarana Melalui Website JDIIH Kalteng	12 Bulan	240.000.000	288.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 22.10	Publikasi Produk Hukum Daerah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Jumlah Sarana Melalui Publikasi Produk Hukum Daerah	100 cetak publikasi	Peningkatan Jumlah Sarana Melalui Publikasi Produk Hukum Daerah	100 cetak publikasi	Peningkatan Jumlah Sarana Melalui Publikasi Produk Hukum Daerah	100 cetak publikasi	60.000.000	72.000.000	BIRO HUKUM	
4.06 - 4.6.0302 - 22.11	Menerbitkan buku himpunan produk hukum daerah	Tata Kelola Pemerintah yang baik (good governance)		Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Jumlah Sarana Melalui Himpunan Produk Hukum Daerah	500 buku himpunan produk hukum daerah	Peningkatan Jumlah Sarana Melalui Himpunan Produk Hukum Daerah	500 buku himpunan produk hukum daerah	Peningkatan Jumlah Sarana Melalui Himpunan Produk Hukum Daerah	500 buku himpunan produk hukum daerah	60.000.000	72.000.000	BIRO HUKUM	

BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi disusun sebagai bahan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam usaha untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Palangka Raya, Juli 2017

KEPALA BIRO HUKUM



AGUS RESKINOF, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601103 199303 1 003